

PEMBERDAYAAN KEARIFAN LOKAL MEMACU KESETARAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL *

Rusmin Tumanggor

ABSTRAK

Manusia yang masih hidup dan yang telah mati di planet bumi merupakan satu kesatuan energi penentu equilibrium dan carrying capacity planet ini mempertahankan eksistensinya beradaptasi dalam rotasi kosmos. Komunitas manusia yang menempati berbagai wilayah kulit bumi, seirama kemudahan dan tantangan yang dihadapinya mewujudkan pandangan mendasar "world view" sebagai acuan nilai dan norma serta keorganisasian dalam pranata warganya memenuhi kebutuhan hidup di lini zona masing-masing. Takaran inilah esensi kearifan lokal. Lintasan sejarah memperlihatkan mereka telah mampu menjabarkan rumus kehidupan mulai dari tiada, melayani kelahiran, menggeluti keseharian, ritus-seremoni kematian serta visionis persiapan memasuki kehidupan abadi. Secara fenomenal komunitas yang mengalami percepatan pemahaman mengakses lingkungan untuk perubahan sebagian menggapai kemajuan peradaban spektakuler. Ketika mereka berpeluang memimpin, di samping ada yang mengabaikan manusia pada komunitas adat terpencil ada juga diantaranya yang mencoba menanam jasa membuat program pemacu perubahan sesuai alur pikir cerdas berkebudayaan kompleks. Disayangkan upaya tadi banyak gagal. Kini di sadari itu akibat pembangunan yang ditawarkan tidak dimulai dari jejaring akar budaya KAT itu sendiri yaitu kearifan lokal. Memberdayakan KAT bagian dari ekuilibrium alam dan sosial. Mottonya "Senang menggagas sendiri meminggirkan keakraban. Berpikir kreatif sambil meniti pemahaman orang lain mewujudkan monumental tempat bersama menatap ketinggian." Bagaimana implementasinya ke depan, dapat terjembatani lewat tulisan ini.

1. Pengertian dan Kilas Balik

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat "local wisdom" atau pengetahuan setempat "local knowledge" atau kecerdasan setempat "local genius".

Sistem pemenuhan kebutuhan pokok mereka "human basic needs" pasti meliputi seluruh unsur kehidupan; agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian yang tercakup dalam tujuh komponen budaya umum "universal culture" karena terdapat dalam kebudayaan hampir semua suku-suku bangsa. Mereka mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki, mengembangkan unsur kebutuhan mereka itu, dengan memperhatikan ekosistem (flora, fauna dan mineral)

sebagai sumberdaya alam "natural resources" serta sumberdaya manusia "human resources" yang terdapat secara potensial pada warga mereka sendiri.

Di sudut lain sebagian warga negara kita yang memiliki latarbelakang ilmu pengetahuan akademis "scientific back-ground" dan telah memasuki kebudayaan yang lebih progresif ditinjau dari segi dimensi nilai dan norma kehidupan kota ketika duduk sebagai birokrat atau sebagai akademisi yang senang dengan gagasan-gagasan baru "innovation", melihat budaya kehidupan masyarakat lokal sebagai sangat sederhana "simple life" dan terbelakang atau tertinggal "under development communities". Penilaian ini menggunakan kacamata pengembang "provider" dari kalangan akademisi dan birokrat bahkan dikalangan LSM. Dari itulah selama berpuluh tahun pikiran ini mendominasi strategi pembangunan masyarakat dengan maksud terjadinya percepatan perubahan "changing acceleration" kehidupan mereka. Akan tetapi dalam proses itu banyak sekali kegagalan dalam proses implementasi kebijakan hingga program,

karena gagasan itu merupakan perubahan yang didatangkan dari luar dengan paradigma yang tidak tersistem dengan jejaring akar budaya kehidupan yang ada dalam masyarakat. Bahkan yang banyak berubah sebagian oknum birokrat yang terlibat dengan program yaitu menjadi kaya bahkan kaya raya, sementara masyarakat lokal yang dibina tidak banyak perkembangan bahkan banyak yang berdampak bergesernya sejumlah nilai dan norma budaya lokal yang baik kepada kejelekan seperti gotong royong dalam pengolahan sawah pertanian berubah menjadi individual dan ketergantungan kepada pebisnis di bidang terkait seperti traktor. Ini terjadi karena ketidaktuntasan secara sistemik yang holistik. Bahkan jika dihitung dengan jujur, triliunan rupiah dana yang dikeluarkan tidak efektif ditambah dengan penguapan berupa penyimpangan hingga penyelewengan.

Dengan demikian atas banyaknya kegagalan masa lalu, ke depan perlu kesadaran, keseriusan para birokrat, akademisi, pengusaha terkait, LSM (NGO), merubah paradigma, konsep, dan proposisi, serta model teori strategi percepatan pembangunan masyarakat, terutama untuk masyarakat desa di pedesaan maupun masyarakat adat terpencil.

2. Penyebab Kegagalan Ekselarasi Pembangunan Masyarakat Desa Pedesaan dan Komunitas Adat Terpencil

- a. Pembangunan tidak didasarkan kepada pengetahuan pembangun yang lengkap tentang kekuatan "*strength*", kelemahan "*weakness*", peluang "*opportunities*", kendala/ancaman "*threat*" (SWOT) Budaya Kehidupan Masyarakat yang bersangkutan.
- b. Variasi dan diversifikasi pembangunan, membuyarkan dan mempersempit bahkan menghentikan pengintensifan hingga pengecilan bahkan penghentian penganggaran pelaksanaan suatu program dan pendekatannya yang telah berhasil di suatu tempat untuk dilanjutkan uji cobanya ke daerah lainnya. Akibatnya, percepatan perluasan ke berbagai wilayah tidak tercapai dan teori madya (*middle*

theory) dan teori besar (*grand theory*) pun tidak banyak yang terangkat dari pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan (Contoh lama: PAR [*Participatory Action Research*] di bidang *Community Development* dan Contoh Baru: *Basic Competence* di bidang Kurikulum Pendidikan).

- c. Bahkan dari dana yang tersedia itupun tidak jarang oleh birokrasi, akademisi yang diberi peluang, pengusaha terkait, ekspert LSM, peneliti strategi pembangunan yang dilakukan, sangat kental dengan pendewaan, apa yang terpikir oleh birokrat, akademisi, pengusaha terkait, dan LSM.
- d. Jumlah anggaran dan rentangan waktu untuk ekselarasi pembangunan desa Pedesaan dan KAT (Pemetaan, Jenis Bangunan yang dipercepat dan insentif peneliti dan pembangun "*provider*") sangat tidak sesuai atau paradok dengan fenomena masyarakat "*recipient*".
- e. Dari a, b, c dan d masa lalu itu sesungguhnya secara tidak kita sadari sangat tinggi kebodohan atau pelecehan atau ketidakperdulian yang dilakukan oleh pelbagai pihak terkait.
- f. Peneliti dan pembangun sendiri, banyak yang rendah kemampuan intelektual "*cognitive*" atau kualitas kecerdasan "*intelligence quotient*" dan ketrampilan (*skill*), komitmen (*attitude*) dan idealismenya atau mutu kepribadian "*personality quotient*" yang berdampak pada etos kerja (*psikomotorik*) atau bobot semangat yang tersentra pada nilai kekuatan supernatural (Tuhan) "*spiritual quotient*" rendah dalam bertugas. Sering sekali keinginan birokrat, akademisi, pengusaha terkait, LSM, terhadap pembangun yang ditugasi, untuk kepentingan penelitian dan pembangunan dimaksud, menyelewengkan dana tersebut sehingga kualitas kerjanya (*quality insurance*) sangat rendah.
- g. Ketidakmampuan merubah paradigma dan model pendekatan kebijakan ke depan akan membuat desa pedesaan dan KAT menjadi abadi untuk proyek

berkepanjangan dari birokrasi dan akademisi serta LSM dan NGO lainnya, sebagai museum manusia unik (seperti Suku Bangsa Asli Indian di Amerika, Pribumi Aborigine di Australia), kesenjangan sosial laten yang potensial menyulut disorganisasi, konflik, kerusuhan, disintegrasi dan isu kemerdekaan, dan intervensi masyarakat internasional.

Pada dimensi ini negara kita terkesan kurang demokratis, rentan kekacauan dan sungguh tidak arif dalam arus *globalisasi* dimana berbagai pihak berkepentingan kelak memanfaatkan masyarakat desa pedesaan serta KAT sebagai sumbu api perpecahan dan isu dehumanisasi, karena kelambanan budaya serap (*access cultural lag*) dan jurang kenistaan (*the depths of misery*) yang terlalu menganga.

3. Tawaran Teori Yang Tak Kunjung Serius di Elaborasi di Indonesia

a. Teori *Community Development* PAR (*Participatory Action Research*)

Secara harfiah (kajian teoritis dan kerangka konseptual), di paruh jalan ada yang dinamakan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yaitu teknik penilaian untuk mengkaji kondisi masyarakat, untuk mempercepat terlaksananya proyek pembangunan. Pada beberapa tempat dan kasus, sering juga disebut PLA (*Participation Learning and Action*). Pendekatan PRA dilakukan lebih pada proses yang dikaji sehingga amat berorientasi pada pengamatan kondisi (sosial, ekonomi, budaya) sampai mendapatkan sebuah informasi. Dalam melakukan PRA ada beberapa teknik yang biasa dipakai sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan informasi yang diperlukan, diantaranya: 1) penelusuran sejarah, 2) bagan kecenderungan dan perubahan, 3) kalender musim, 4) jadwal sehari, 5) peta desa, 6) transek, 7) peta kebun, 8) diagram Venn, 9) bagan alur, 10) kajian mata pencaharian, 11) *matrix ranking*, dan 12) wawancara terstruktur. Kemudian masyarakat diikutkan dalam proses pekerjaan, tidak sejak ide rancang bangunnya.

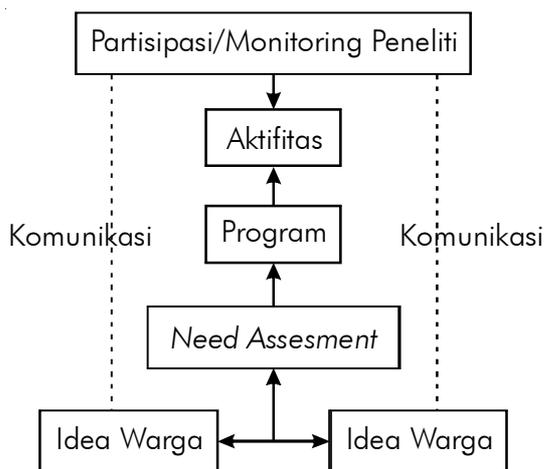
Selama ini program pengembangan dan penanganan masalah kemasyarakatan terutama yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan asumsi bahwa ada sejumlah konstruksi narasi besar yang ditransformasikan ke dalam masyarakat. Program penanganan masalah kemasyarakatan telah di *setting* melalui strategi besar kebijakan umum (*The grand strategic of public policy*), landasan hukum (*legal conditions*), petunjuk pelaksanaan/Juklak (*implement regulations*) dan petunjuk teknis/juknis (*technical procedure guideline*), dari mulai tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan. Aparatur pemerintah maupun penggiat masyarakat harus menjalankan program itu tanpa berusaha untuk melakukan improvisasi, inovasi dan inisiasi termasuk memperhatikan potensi-potensi sosial, ekonomi dan budaya dari gagasan (*idea*) masyarakat setempat (*local potencies*). Padahal sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tidaklah mungkin seragam karena secara fenomenal sangat kompleks. Implikasi dari pendekatan semacam ini adalah makin lemahnya partisipasi masyarakat. Sehingga hal itu menyebabkan kurangnya motivasi berupa daya tarik (*pull factor*) dan daya dorong (*push factor*) masyarakat untuk ikut terlibat dalam melakukan prakarsa, perencanaan, memberikan usul, merumuskan dan mengevaluasi serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik pada berbagai levelnya, baik pusat maupun daerah senada dengan ruh otonomi daerah (*the regency autonomous spirit*).

Dalam konteks berbagai kegagalan inilah pengorganisasian masyarakat atau *Community Organizing* (CO) menjadi pilihan pendekatan untuk penanganan masalah konflik, pembangunan dan penguatan masyarakat sebagai modal utama (*social capital*) yang substansil. Pemeran utamanya (*The leading role player*) adalah masyarakat sendiri (*community it's by self*), sedangkan *community organizer* semata berperan sebagai fasilitator dan katalisator yang menggali dan mengembangkan potensi sosialnya sehingga menjadi masyarakat yang kuat

dan saling menerima hingga menyatu (*forceful and integrative community*), yang dengan itu tidak akan mudah untuk terpancing kembali menyelesaikan permasalahan yang muncul atau terprovokasi melalui konflik fisik. Peran *community organizer* sebagai katalisator ini sedianya telah mempercepat gerak perubahan, dan merangsang tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk menentukan langkahnya sendiri (*self-determination*) dan kemampuan untuk menolong dirinya sendiri (*self-help*). Pada perkembangan berikutnya, masyarakat diharapkan mampu *self-regulating*. Pendekatan inilah yang dimaksudkan dengan *Participatory Action Research (PAR)*.

Dari uraian di atas dapat dikembangkan kerangka konseptual dari teori pendekatan PAR tersebut sbb:

Bagan Skema Kerangka Konseptual Penelitian PAR



Jika dinarasikan kerangka konseptual di atas sebagai model teoritis yang di angkat dari uraian para ahli maupun pengalaman penulis di lapangan adalah "Semakin mengakar program dari ide, aktivitas sosial dan perilaku bersama internal atau dan lintas masyarakat dalam membangun atau melakukan perubahan dan direspon secara partisipatif oleh peneliti atau pembangun, akan semakin mempercepat kemajuan dalam berbagai komponen kehidupan hingga penguatan serta penambahan komponen pranata

atau kelembagaan dalam masyarakat yang bersangkutan (*The Community Sharing Ideas Theory*).

b. *Rejection - Adoption Theory*

1). **Faktor-faktor yang mengurangi penolakan inovasi (gagasan baru) pembangunan**

Goodwin Watson telah mengumpulkan data berbagai hasil penelitian tentang upaya pembangunan dan pengembangan masyarakat dari sekitar 500 studi difusi inovasi di berbagai bidang kajian keilmuan baik secara empiris maupun non-empiris, khususnya di negara-negara berkembang yang dilakukan oleh Eicholz dan Rogers (Zaltman, et al. , 1972 : 621). Dari situ diperoleh 12 prinsip yang dapat mengurangi penolakan (*resistance*) atas gagasan baru (*innovation*) sbb:

- (a) Resistensi akan berkurang jika administrator, guru-guru, anggota-anggota pengurus dan pimpinan-pimpinan masyarakat merasa bahwa proyek (inovasi) itu adalah milik mereka bukan sesuatu yang direncanakan dan dilaksanakan oleh orang lain (luar).
- (b) Resistensi akan berkurang jika inovasi itu secara jelas mendapat dukungan sepenuhnya dari pimpinan tertinggi dari sistem (kehidupan masyarakat) itu.
- (c) Resistensi akan berkurang jika partisipan melihat perubahan itu sebagai upaya pengurangan beban mereka sekarang dan bukan justru menambah beban baru.
- (d) Resistensi akan berkurang jika inovasi itu serasi dengan nilai-nilai (*values*) dan gagasan-gagasan yang telah lama diketahui masyarakat.
- (e) Resistensi akan berkurang jika dalam inovasi itu partisipan merasa bahwa kemandirian (*autonomy*) dan keamanan (*security*) mereka tetap terjamin.
- (f) Resistensi akan berkurang jika program inovasi itu menawarkan jenis pengalaman yang dapat menarik minat partisipan.

- (g) Resistensi akan berkurang jika partisipan diikuti dalam upaya diagnostik yang membawa mereka untuk menyetujui apa yang jadi problema mendasar (gagasan sentral) dan untuk yang merasakan bahwa hal itu penting dipecahkan dan dicarikan jalan keluarnya.
- (h) Resistensi akan berkurang jika inovasi itu diadopsi atas dasar keputusan (konsensus) kelompok itu sendiri.
- (i) Resistensi akan berkurang jika penganjur (*proponent*) mampu untuk memperkenalkan diri secara baik/jelas (*emphatize*) terhadap penerima anjuran (*opponent*), memperkenalkan kesulitan-kesulitan yang berarti atau perlu diatasi serta mengambil langkah-langkah seperlunya terhadap hal-hal yang tidak pantas ditakuti.
- (ii) Resistensi akan berkurang jika diberitahukan dengan bijaksana atas penolakan terhadap inovasi karena kesalahfahaman dan salah penafsiran, dan jika ketentuan yang dibuat untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) persepsi masyarakat tentang inovasi serta penjelasan-penjelasan berikutnya sesuai dengan yang mereka butuhkan.
- (k) Resistensi akan berkurang jika partisipan mendapatkan penerimaan, dukungan, pembenaran serta kepercayaan dari teman-teman mereka satu sama lainnya.
- (l) Resistensi akan berkurang jika inovasi itu terbuka atas kritikan perbaikan dan pertimbangan ulang jika dibutuhkan untuk mendapatkan perubahan yang lebih memuaskan.¹

2). Teori penerimaan dan penolakan gagasan baru dalam pembangunan

Sementara itu teori penerimaan dan penolakan gagasan baru yang dideskripsikan oleh Eicholz dan Rogers dengan nama *a rejection-adoption theory*. Proses adopsi terjadi disebabkan lima tahap: (1) *awareness* (kesadaran). Semula individu atau kelompok yang bersangkutan tidak mengetahui dan mengabaikan (*ignorance*) inovasi itu.

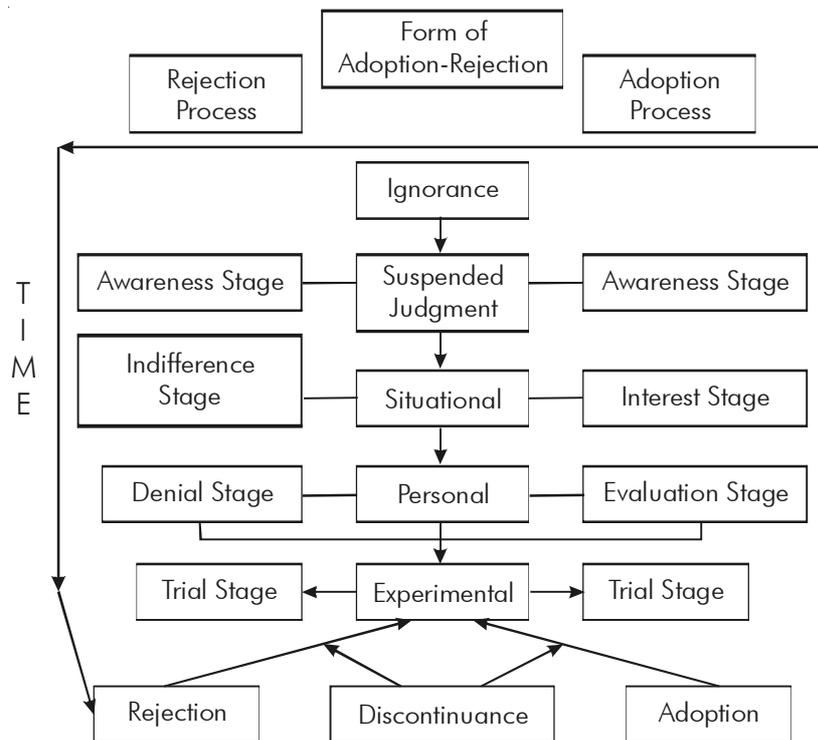
Kemudian dengan kesadaran bersedia belajar tentang eksistensi inovasi yang belum diketahui tadi. Meskipun sebelumnya ia telah memiliki pengetahuan lama (*traditional*). Tahap ini penggunaan inovasi masih ditangguhkan selama mempertimbangkan (*suspended judgment*) nilai hakiki yang terkandung didalamnya sambil membandingkannya dengan cara lama; (2) *interest* (menaruh minat). Individu bersangkutan memperluas upaya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang adat-istiadat, agama, pendapat warga masyarakat umumnya, yang berkaitan dengan dorongan dan larangan berupa beban sosial dan finansial jika inovasi itu digunakan. Jadi ia mempelajari keadaan (*situational*); (3). *evaluation* (penilaian). Individu bersangkutan menilai inovasi itu dan mendorong jiwanya memilih hal-hal yang sesuai dengan kondisi dirinya (*personal*); (4) *trial* (percobaan). Individu bersangkutan mulai memberanikan diri untuk menggunakan inovasi sebagai percobaan pendahuluan (*experiment*). Ketika gagal dicobanya lagi hingga berhasil; (5) adopsi (penggunaan). Individu bersangkutan menerima inovasi itu digunakan seterusnya atas dasar percobaan yang berhasil sebelumnya. Akan tetapi jika pada penggunaan-penggunaan berikutnya terus menerus gagal, maka penggunaan itu akan dihentikan (*discontinuance*).

Sebaliknya penolakan (*rejection*) terjadi karena tahapan-tahapan berikut: 1) *awareness* (kesadaran). Individu bersangkutan semua belum memiliki pengetahuan tentang inovasi (*ignorance*) dan telah memiliki pengetahuan lama (*traditional*). Ketika mengikuti pelajaran, inovasi itu dirasakan lebih kompleks dan sulit dimengerti hingga terjadi kesalahpahaman. Penggunaan inovasi ditangguhkan (*suspended judgement*), sementara pertimbangan cenderung mengambil jalan pintas saja yaitu penggunaan cara lama lebih mudah, sudah biasa, aman dari segi sosial, terjangkau secara finansial dan berhasil juga. Sehingga tidak lagi diiringi dengan upaya belajar yang sungguh-sungguh;

(2) *indifference* (acuh tak acuh). Individu bersangkutan semakin acuh tak acuh setelah melihat keadaan (*situational*). Meskipun inovasi itu kelihatannya logis, tetapi kurang mereka perhatikan karena belum biasa dalam masyarakat, diragukan bertentangan dengan agama, adat istiadat, norma, nilai dan pendapat orang umumnya; (3) *denial* (penolakan). Pada masa kebutuhan pemilihan inovasi yang sesuai untuk dirinya (*personal*), individu bersangkutan tidak memahami betul fungsi inovasi itu menggantikan apa dari cara lama, apa faedahnya yang lebih menonjol daripada cara lama, bagaimana kedudukan cara lama yang digantikannya. Sehingga ia menyangkal kehadiran inovasi; (4) *trial* (percobaan).

Ketika individu bersangkutan atau orang lain melakukan percobaan dengan inovasi itu (*experiment*), terjadi insiden atau kegagalan, individu bersangkutan tidak lagi berusaha untuk mencoba hingga berhasil, akan tetapi kembali saja kepada cara lama yang telah dia ketahui dan biasa dipraktikkan; (5) *rejection* (penolakan). Individu bersangkutan akan mengakhiri dengan penolakan seterusnya terhadap inovasi tersebut dan tetap mempraktekkan cara biasa. Konsekuensi logis dari penolakan ini, pemutusan penggunaan (*discontinuance*) akan berlangsung dalam waktu panjang yang tidak terpastikan (Zaltman, et. al., 1972:624). Skema dari *The rejection-adoption theory* ini terlihat sebagai berikut:²

Bagan Skema Alur Adoption-Rejection Theory



Dalam diagram ini terlihat ada masa *ignorance*, *suspended judgment*, *situational*, *personal* dan *experimental*, yaitu masa pengabaian, penangguhan pertimbangan, memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan diri, serta pengalaman.

3). Komponen-Komponen Penting Dalam *Community Development*

a). *Filsafat program Community Development*

Pada hakikatnya *community development* adalah usaha menolong seseorang atau kelompok agar mampu memajukan dirinya sendiri (*The self help-oriented philosophy*). Dan umur *community development* hanyalah bersifat sementara, selama masyarakat belum mampu mandiri dan menyesuaikan diri dalam segala pertumbuhan dan perkembangan kehidupan. Setelah itu stop.

b. *Tujuan Community Development*

Tujuan utama adalah memperbaiki kehidupan masyarakat dengan menghilangkan penderitaan mereka sehingga mencapai kemakmuran. Tahap-tahapnya dimulai dari pemenuhan kebutuhan asasi manusianya.

c). *Metode Community Development*

Dalam program *Community Development* dapat ditempuh dengan dua cara yaitu dari atas ke bawah bercirikan sistem perintah atau komando; ada pula yang dari bawah ke atas. Ciri-ciri khas sistem tersebut:

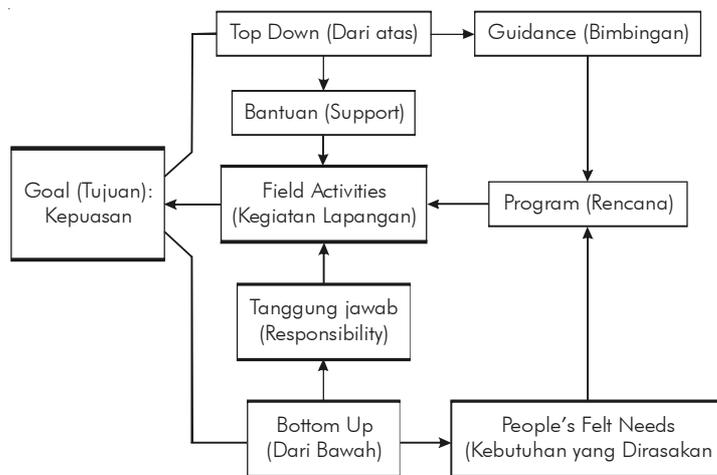
(1) Jika dari atas ke bawah, petugas dari luar masyarakat desa menentukan kebutuhan penduduk menurut pandangan petugas itu sendiri. Merencanakan dan mengambil

keputusan-keputusan. Berarti inisiatif tetap ditangan petugas pusat. Yang dipentingkan adalah pencapaian target, penyelesaian tugas atau masalah dengan logis, menurut tolok ukur pikiran akademis atau empirisnya (*Top Down strategic*) atau (*Ethic approach*). Dan yang pertama ini telah ditempuh oleh banyak negara termasuk Indonesia masa Orde Baru bahkan masih banyak dilaksanakan hingga kini. Cara ini banyak menuai kritik karena menghadapi kegagalan yang luar biasa.

(2) Jika tumbuh dari bawah, masyarakatlah yang menentukan kebutuhan mereka sendiri dan merencanakan serta melaksanakan program (*Bottom-up strategic*) atau (*Emic approach*). Terpenting adalah dorongan masyarakat membangun dirinya sendiri (*Social sustaining growth*). Mengambil keputusan, merencanakan dan melaksanakan sesuatu secara otonom (Nicholas Bennett: 1980, p.129). Sistem yang terakhir ini lebih menguntungkan dalam banyak hal. Penggunaan tenaga dan dana lebih efektif dan menyebar. Masyarakat lebih bertanggungjawab dan puas. Kepercayaan pada diri sendiri lebih besar. Persatuan dan kerjasama meningkat. Kesempatan melatih warga masyarakat lebih luas. Kelemahannya ada juga, yaitu memerlukan banyak waktu dan kesabaran. Jadi yang baik jika kedua itu dikaitkan secara proporsional dan relevan seperti berikut.

(3) Program dikembangkan dari bawah (*start from behind*), sementara bimbingan (*guidance*) dan sebahagian pendanaan (*stimulance budget*) dari atas, sebagai berikut:³

Bagan Alur konsep sistem *Community Development*



Dari semua uraian di atas, ada 4 hal yang terliput di dalam sistem *Community Development*: (1) Peningkatan kesejahteraan hidup; (2) Pertumbuhan sifat kemandirian "*Self Sustaining Growth*": Mula-mula pemberian ikan (*fish*); lambat laun pemberian pancing (*fishing rod*); lama kelamaan pendidikan metode memancing (*fishing rod methods: how to fish*) dan; akhirnya mandiri; (4) Bersifat kerakyatan dan melingkar (*cluster*). Program tumbuh dari masyarakat peminat atau berkepentingan "*interest group*"; (5) Modal dasar dari bawah, bimbingan dan bantuan dari atas (Diskusi dengan R. William Liddle-P3IS Unsyiah 1987).

Secara pengajaran akademis, pada pelatihan, seminar, diskusi dan bentuk lainnya, paradigma, konsep dan model teori tersebut telah lama dan masih sering diperbincangkan dalam forum yang serupa. Sayangnya hal itu buyar terhadap banyak *setting* dan wilayah kajian termasuk KAT tatkala dihadapkan kepada penelitian atau pembangunan yang sesungguhnya, karena sejumlah faktor:

- a. Penyeragaman sistem pertanggungjawaban waktu dan anggaran penelitian dan pembangunan oleh negara (Bappenas; Ditjen Anggaran; BPK) yang penulis pandang sangat kaku;
- b. Penyeragaman pada butir a itu terjadi kalau bukan karena ketidaktahuan, mungkin karena arogansi

sebagai cerminan dari etnosentris keilmuan, atau kebijakan yang berpihak tidak membuat *political will* yang totalitas untuk bangsa;

- c. Atas sudah adanya sejumlah anggaran yang dialokasikan kepada *setting* tersebut, namun para peneliti atau pembangunnya tidak punya wawasan dan komitmen (kompeten) yang serius sampai dengan batas anggaran dan waktu yang minim itu sehingga tidak memenuhi sasaran;
- d. Kecenderungan mengalihkan anggaran program tersebut kepada program bidang lain yang dianggap lebih penting.
- e. Kemungkinan pembocoran anggaran tersebut yang mengakibatkan, banjir di pihak lain dan kekeringan di pihak yang berhak.

4. Komponen Penting Dalam Upaya Pemberdayaan Kearifan Lokal

Ilmuwan antropologi seperti Koenjeringrat, Spradley, Taylor, Suparlan mengkategorisasi kebudayaan manusia yang menjadi wadah kearifan lokal itu kepada idea, aktivitas sosial, artifak. Dengan kategorisasi lain: sistem budaya, sistem sosial dan sistem teknologi. Paul Ricover, mendeskripsi kebudayaan kepada tiga pelapisan secara terbalik dengan para ahli di atas dengan

contohnya sekaligus: *Lapisan pertama*; Kumpulan benda-benda yang dihasilkan oleh sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu masyarakat: rumah, sawah, masjid, tenunan, dsb. *Lapisan kedua*; system nilai, lambang-lambang, pola tingkah laku, tradisi, pranata sosial yang mengatur cara hidup suatu masyarakat. *Lapisan ketiga*; *Etyco-mythical-nucleus* yaitu kompleks nilai-nilai yang paling asasi yang menjadi *central point of reference* dan sumber inspirasi bagi kreativitas para pendukungnya (dapat diidentikkan dengan inti atom yang mengatur seluruh peredaran bagian-bagian yang lain). Atas dasar itulah dapat direntangkan komponen-komponen penting dalam upaya pemberdayaan kearifan lokal, sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan idea (sistem budaya: *world view*; visi dan misi; nilai dan norma), pranata dan aktivitas sosial (sistem sosial: keorganisasian dan peran semua pihak di dalam menjalankan hak dan kewajibannya), dan peralatan hidup (sistem teknologi: perkakas rumah tangga, pengolahan pekerjaan; transportasi; produksi) setempat untuk memulai renstra percepatan pembangunan masyarakat terkait;
- b. Idea, pranata dan aktivitas sosial serta peralatan hidup dimaksud mencakup tujuh budaya universal: agama (religi), ilmu pengetahuan menyeluruh (kosmologi), teknologi, ekonomi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian.
- c. Pengedepanan Tokoh Masyarakat (*Local Genius*) dan Warga masyarakat (*Community Members*) Dalam Proses Pendekatan Yang digunakan (*Programming Process Approach*).
- d. Memberi bimbingan kepada masyarakat dalam menganalisa *need assesment*, pembuatan program dan anggarannya, dan penyusunan proposal pengajuan pendataan dan pembangunan masyarakat KAT.
- e. Mendampingi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan KAT dan berpartisipasi dalam diskusi-diskusi solusi masalah yang dihadapi dalam proses akselarasi pembangunan, maupun merealisasi gagasan-gagasan mereka yang baik untuk pembangunan dimaksud.
- f. Mewaspadaai kemandekan dengan menugaskan konsultan dan *community organizer* dari masyarakat lokal sebagai pembantu dan supervisor dalam upaya kontinuitas pemberdayaan tersebut.
- g. Memperkuat dan mengembangkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam perubahan yang diperlukan: transportasi (jalan), ekonomi (pasar), kesehatan (puskesmas), pendidikan (sekolah, perpustakaan dan taman bacaan), pemukiman (penataan ruang perumahan), penerangan (listrik), keamanan (pos polisi), komunikasi (telepon), dsb. Komponen ini disesuaikan dengan program kesepakatan dan persetujuan masyarakat.
- h. Menugasbelajarkan putra-putri tercerdas setempat ke luar daerah secara proporsional, sebagai calon pelopor perubahan KAT masa depan.
- i. Perlindungan dan penguatan perlindungan hukum atas hak komunal tempat mereka hidup dan berusaha memenuhi kebutuhannya.

5. Contoh-Contoh Kearifan Lokal

a. Aceh

Udep tsare mate syahid (Hidup bahagia, meninggal terterima Allah Swt); *Hukom ngon adat lagge zat ngon sifeut* (Antara hukum dengan adat seperti zat dengan sifatnya);

Ini menggambarkan semua komponen kehidupan yang dapat diraih agar ditumbuhkembangkan. Sementara acuan agama tentang kehidupan, ketuhanan dan peribadatan dilaksanakan. Pembangunan masyarakat mulai dari komponen kehidupan mereka dan terkait dengan nilai serta norma religi mereka.

b. Melayu (Deli; Kalimantan Barat; Sibolga; Sumatera Barat; Malaysia)

Lain lubuk lain ikannya, dimane bumi diinjak di situ langit dijunjung.

Ini berarti membangun kehidupan mereka hendaklah mulai dengan isi kehidupan mereka. Nilai dan Norma yang harus dikembangkan adalah yang serasi dengan budaya setempat.

c. Batak

Hasangapon, hagabeon, hamoraon, sarimatu (Kewibawaan, Kekayaan, keturunan Yang Menyebar, Kesempurnaan Hidup).

Ini bermakna bahwa pembangunan haruslah yang dapat meningkatkan kedudukan, harta, modal kesehatan reproduksi, ilmu dan keberanian merantau. *Nilakka tu jolo sarihon tu pudi* (Melangkah ke depan pertimbangkan ke belakang).

d. Sumatera Barat

Bulek ai dek pambuluah, bulek kato jo mupakkek (Bulat air karena pembuluh, bulat kata dengan mufakat); *Adat ba sandi syara', syara' ba sandi kitabullah* (Adat berlandaskan hukum, hukum bersendikan kitab suci).

e. Jayapura

Wamena: Weak Hano Lapukogo (Susah Senang Sama-sama); *Ninetaiken O'Pakeat* (Satu Hati Satu Rasa).

Ini berarti pembangunan yang ditawarkan harus yang dapat membuat mereka sama-sama aktif dan menikmati hasil juga secara bersama.

f. Sulawesi Selatan

Bugis: Sipakatau (Saling mengingatkan); *Sipakalebbi* (Saling menghormati); *Mali Siparappe, Mali Sipakainge, Rebba Sipatokkong* (Saling Mengingatkan, Saling Menghargai, Saling Memajukan).

g. Sulawesi Utara

- 1). Manado: *Baku Beking Pandei* (Saling memandaikan satu sama lainnya)
- 2). Minahasa: *Torang Samua Basudara* (Kita semua bersaudara); *Mapalus* (Gotong royong); *Tulude – Maengket*

(Kerjabakti untuk rukun) *Baku-Baku bae-baku-baku sayang, baku-baku tongka, baku-baku kase inga* (Saling berbaik-baik, sayang-menyayangi, tuntun-menuntun dan ingat mengingatkan); *Sitou Timou, Tumou Tou* (Saling Menopang dan hidup menghidupkan: Manusia hidup dan untuk manusia lain)

- 3). Bolaang Mangondow: *Momosat Gotong royong; Moto tabian, moto tampiaan, moto tanoban* (Saling mengasahi, saling memperbaiki, dan saling merindukan)

h. Sulawesi Tengah

- 1). Kaili: *Kitorang bersaudara* (Persaudaraan); *Toraranga* (Saling mengingatkan); *Rasa Risi Roso Nosimpotobe* (sehati, sealurpikir, setopangan, sesongsongan).
- 2). Poso: (Suku Pamona, Lore, Mori, Bungku dan Tojo/Una-Una, Ampana, dan pendatang: Bugis, Makassar, Toraja, Gorontalo, Minahasa; Transmigrasi: Jawa, Bali, Nusa Tenggara): *Sintuwu Maroso* (Persatuan yang kuat: walau banyak tantangan, masalah, tidak ada siapapun yang dapat memisahkan persatuan warga Poso tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan).

i. Sulawesi Tenggara

Kalosara (Supremasi sistem rukun dan pencegahan konflik); *Samaturu* (bhs. Tolala) : Bersatu, gotong royong, saling menghormati; *Depo adha adhati* (Muna) : Saling menghargai.

j. Bali

Manyama braya (semua bersaudara); *Tat Twam Asi* (senasib sepenanggungan); *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan);

- 1). *Pariangan* (harmoni dengan Tuhan).
- 2). *Pawongan* (harmoni dengan sesama manusia).

- 3). *Palemahan* (harmoni dengan lingkungan alam).
- k. **Jambi**
Lindung melindungi bak daun sirih;
Tudung menudung bak daun labu;
Rajut merajut bak daun petai;
 (Saling tolong menolong/saling menghargai).
- l. **Jawa Timur**
Siro yo ingsun, ingsun yo siro: Kese-
 derajatan (Egalitarianism);
Antar-antaran ugo : Persaudaraan
- m. **Kalimantan Selatan**
Kayuh baimbai (Bekerja sama); *Gawi sabumi* (Gotong royong);
Basusun sirih (Keutuhan); *Menyisir sisi tapih* (Introspeksi).
- n. **Kalimantan Tengah**
 1). Dayak Kanayatn: *Adil ka' talimo, bacuramin ka'saruga, ba sengat ka' jubata*. (Adil sesama, berkaca surgawi, bergantung pada Yang Esa); *Rumah betang* (Bersama dan saling tenggang); *Handep-habaring hurung* (Nilai kebersamaan dan gotong royong); *Betang* (Semangat rumah panjang).
- 2). Dayak Bekati: *Janji baba's ando* (Janji harus ditepati); *Janji pua' take japu* (Janjan janji sekedar kata-kata).
- o. **Kalimantan Timur**
 Dayak Bahau: *Murip ngenai* (Makmur Sejahtera); *Te'ang liray* (Unggul diantara sesama: Kompetisi sehat).
- p. **Nusa Tenggara Barat**
 1). Propinsi
Saling jot (Saling memberi);
Saling pelarangin (Saling melayat);
Saling ayon (Saling mengunjungi: silaturahmi);
Saling ajinin (Saling menghormati);
Patut (Baik, terpuji, hal yang tidak berlebihan);
- Patuh* (Rukun, taat, damai, toleransi, saling harga menghargai);
Patju (Rajin, giat, tak mengenal putus asa);
Tatas, Tuhu, Trasna (Berilmu, Berakhlak/ Etika, Bermasyarakat).
- 2). "Sasak-lombok":
Bareng anyong jari sekujung (Bersama-sama lebur dalam satu perahu);
Beleq kayuk beleq papan na (Besar kayu besar papannya);
Embe aning jarum ito aning benang (Kemana arah jarum kesitu arah benang);
Endang kelebet laloq leq impi (Jangan terlalu terpesona oleh mimpi);
Endaq ngegaweh marak sifat cupak (Jangan memakai atau bersifat seperti cupak);
Endaq ta beleqan ponjol dait kelekuk (Jangan lebih besar tempat nasi daripada tempat beras);
Endaq ta ketungkulan dengan sisok nyuling (Jangan terlenu dengan siput menyanyi);
ldepta nganyam memeri, beleqna embuq teloq (Seperti usaha memelihara anak itik, sesudah besar memungut telurnya);
Keduk lindung, bani raok (Berani cari belut harus berani kena lumpur);
Laton kayuq pasti teaban isiq angin (Setiap pohon pasti dilanda oleh angin).
- 3). "Mbojo (Bima)"
Bina kamaru mada ro kamidi ade, linggapu sadumpu nepipu ru boda (Janganlah menidurkan mata dan berdiam diri, perbantallah kayu, dan perkasurlah duri kaktus);
Arujiki jimba wati loa reka ba mbe-e (Rejeki domba tidak bisa didapat oleh kambing);
Ngaha rawi pahu (Berkata, berkarya hendaklah menghasilkan kenyataan).
- q. **DIY/Yogyakarta**
Alon-alon asal kelakon (Biar pelan asal selamat: kehati-hatian);
Sambatan (Saling membantu).
- r. **Solo Jawa Tengah**
Ngono yo ngono neng ojo ngono (Gitu ya gitu tapi jangan gitu);
Mangan ora mangan yen ngumpul (Makan tidak makan ngumpul);

Siliwangi: Esa hilang dua terbilang: (Bandingkan: Patah tumbuh hilang berganti pada semboyan "Pramuka").

s. **Lampung**

Sakai sambayan (Sikap kebersamaan dan tolong menolong);

Alemui nyimah (Menghormati tamu);

Bejuluk beadok (Memberi gelar/julukan yang baik kepada orang).

t. **Bengkulu dan Rejang Lebong**

Adat besendai sarak, sarak besendai Kitabullah (Mirip Sumatera Barat); Tip-tip ade mendeak tenaok ngen tenawea lem Adat ngen Riyan Cao (Setiap ada tamu ditegur sapa dengan adat dan tata cara); Di mana tembilang di cacak disitu tanah digali (Bengkulu); Naek ipe bumai nelat, diba lenget jenunjung (Rejang Lebong) (Mirip Melayu). Titik mbeak maghep anak, tuwai ati tau si bapok (Kecil jangan dianggap anak, tua belum tentu dia Bapak); Kamo bamo (kekeluargaan dan mengutamakan kepentingan orang banyak). Amen ade dik rujuak, mbeak udi temnai benea ngen saleak, kemin gacang sergayau, panes semlang si sengok, sileak semlang si betapun (jika ada musibah, jangan mencari kambing hitam, dinginkan hati yang panas, luka agar bertangkup dan tidak berdarah).

u. **Madura**

"Sampang": Abantal ombak asapo' angina (Berbantal ombal-berselimut angina); Lakona-lakone, kennengga-kennengge (Kerjakan dengan baik apa yang menjadi pekerjaanmu dan tempati dengan baik pula apa yang telah ditetapkan sebagai tempatmu); Todus (Malu); Ango 'an poteo tolang, e tebang potea mata (Lebih baik putih tulang daripada putih mata).

v. **Maluku**

"Ambon": *Pela Gandong* (Saudara yang dikasihi: Penguatan persaudaraan lewat kegotongoyongan dalam kehidupan);

Gendong beta-gendongmu jua (Deritaku-deritamu juga).

w. **Maluku Utara**

"Ternate": *Marimoi Ngone Futuru, Doka Saya Rakomoi* (Bersatu kita teguh).

Apa yang tertera di atas ini bukanlah langsung cerminan *ekspresi world view* KAT (Data Thn 2004 [Atlas Nasional Persebaran Komunitas Adat Terpencil], di Indonesia terdapat KAT di 2.811 Lokasi, 2.67.550 KK dan 1.192.164 Jiwa. Yang sudah diberdayakan 709 lokasi, 51.420 KK, 2.32.874 Jiwa. Yang sedang diberdayakan 174 lokasi, 11.101 KK, dan 48.357 Jiwa. Dan yang belum diberdayakan sebanyak 1.928 lokasi, 2.05.029 KK, 9.10.933 Jiwa. Jadi kita masih memiliki 211 Kabupaten, 804 Kecamatan serta 2.328 Desa yang didalamnya terdapat KAT sebagai saudara kita sebangsa dan setanah air). Ungkapan tadi adalah *petatah petitih* melayu, bahasa *kromo inggil* Jawa, petuah, dll, yang diperoleh dari berbagai suku wilayah di Indonesia. Berupa contoh keragaman ungkapan suku-suku bangsa yang menjadi bagian dari kearifan lokal yang jadi kendali dalam menjalankan kehidupan. Apa yang diutarakan disini pun masih sangat minim jika dibandingkan dengan seluruh suku-suku bangsa kita yang ada di nusantara (429 suku bangsa besar). Namun tulisan ini bermaksud mengetuk hati kita semua, bahwa percepatan pembangunan KAT sudah masanya dimulai dari kearifan lokal mereka sendiri. Hingga sekarang data yang kita miliki tentang kearifan lokal KAT masih minim sekali. Pendataan lewat pemetaan menyeluruh (*holistic mapping*) harus segera dilaksanakan.

6. Kebijakan Pemberdayaan

Setelah memperoleh data lengkap tentang kearifan lokal dari masing-masing wilayah KAT, komponen-komponen yang perlu ditelisik untuk dijadikan objek pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan strategi
 - 1). Program disusun melalui tahapan-tahapan prioritas dan berkesinambungan
 - 2). Manajemen pengembangan secara berangsur-angsur bergeser dari pembinaan kepada kemandirian dan pelayanan
 - 3). Akses Program pemberdayaan menyentuh seluruh unsur kehidupan
 - 4). Manajemen efektif diterapkan mulai dari Direktorat hingga lapangan
- b. Kebijakan teknis
 - 1). Program:
 - a). Pembinaan sistem keagamaan/sistem keyakinan KAT
 - b). Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Pendidikan) KAT
 - c). Pengembangan Ekonomi KAT
 - d). Pengembangan teknologi KAT
 - e). Pengembangan keorganisasi-sosialan (Pranata) Masyarakat
 - f). Pengembangan Bahasa Lokal dan Bahasa Indonesia
 - g). Pengembangan Kesenian KAT
 - 2). Kegiatan:
 - a). Pembinaan Keagamaan/Sistem keyakinan KAT
 - (1) Peribadatan Warga KAT
 - (2) Rumah Ibadah Warga KAT
 - (3) Hari-hari besar Keagamaan KAT
 - b). Pengembangan Ilmu Pengetahuan KAT
 - (1) *World View* mereka tentang Kehidupan (Diskusi)
 - (2) Pendidikan Untuk Orang Dewasa (Bahasa Indonesia; dll)
 - (3) Pendidikan Untuk Anak Usia Sekolah
 - (4) Pendidikan Ketrampilan (Diskusi dan latihan)
 - (5) Pendidikan tentang Kesehatan (Diskusi dan latihan)
 - (6) Pendidikan Tentang Pakaian (Diskusi dan Solusi)
- c). Pengembangan Ekonomi KAT
 - (1) Penguasaan tentang sumberdaya alam dan produknya
 - (2) Teknik penyimpanan dan pengawetan produksi
 - (3) Pengembangan sarana dan prasarana pasar
 - (4) Teknis pemasaran hasil produksi
 - (5) Teknik penggunaan uang
- d). Pengembangan Teknologi KAT
 - (1) Pengenalan peralatan hidup untuk mata pencaharian dan kemungkinan penggunaan peralatan hidup yang baru bagi KAT
 - (2) Pembangunan mesin teknologi sederhana (tepat guna) bagi pengolahan produksi KAT
 - (3) Pembangunan jalan antar kampung, sumber ekonomi/mata pencaharian
 - (4) Pembangunan atau penataan perumahan dan penerangan rumah tangga dan umum
 - (5) Pengenalan informasi telekomunikasi yang mungkin seperti radio, dll
- e). Pengembangan Organisasi Sosial KAT
 - (1) Pengaktifan dan atau penumbuhan pranata sosial
 - (2) Penguatan dan apresiasi aktualisasi Adat Istiadat (Diskusi dan *Action*)
 - (3) Ketrampilan kepemimpinan
 - (4) Kerukunan Hidup KAT dan pendatang
 - (5) Pemupukan rasa kebangsaan
- f). Pembinaan Bahasa
 - (1) Penguatan Bahasa Lokal (Diskusi dan Terbitkan Buku)
 - (2) Pengayaan Bahasa Indonesia (Pengenalan dan Penyusunan Buku Yang Relevan)
 - (3) Latihan berbahasa Indonesia
 - (4) Penumbuhan lembaga untuk pemeliharaan dan pembinaan bahasa: Lokal dan Indonesia, dll.

- g). Kesenian
 - (1) Pertunjukan kesenian KAT pada saat yang sesuai
 - (2) Pengembangan kesenian KAT
 - (3) Pengenalan kesenian nasional (Lagu Indonesia Raya)
 - (4) Membuat sanggar budaya dan museum mini KAT

3). Ketenagaan

- a). Membina tenaga peneliti untuk KAT
- b). Membina tenaga *community development* untuk KAT
- c). Membina tenaga teknis dalam bidang yang relevan dengan pemberdayaan KAT
- d). Membina kemahiran bahasa KAT bagi peneliti, tenaga *community development* dan tehniisi.

4). Keuangan

- a). Anggaran disusun yang benar-benar mewujudkan program
- b). Mengupayakan pendanaan dari: Pemerintah, NGO dan Dunia Usaha

Catatan: Keuangan disusun sesuai kelayakan program baik secara akademis maupun secara fenomenal (realistis), khususnya tentang waktu dan volume program, tidak berdasarkan kemauan personal atau konspirasi penguasa. (Penyusun Anggaran Harus Visioner dan bekerjasama dengan Penyusun Program).

5). Sinerji

- a). Melakukan kordinasi dengan instansi dan unit terkait, sesuai bidang yang dikembangkan (7 komponen kehidupan yang tertera sebelumnya);
- b). Melakukan MoU dengan dunia usaha dalam bidang yang relevan bagi pemberdayaan KAT

c). dll.

6). Waktu

- a). Jangka waktu untuk satu penelitian minimal 3 bulan di lapangan

- b). Jangka waktu untuk satu program (*community development*) minimal 6 bulan. Untuk program tertentu harus *continue* seperti untuk pendidikan formal

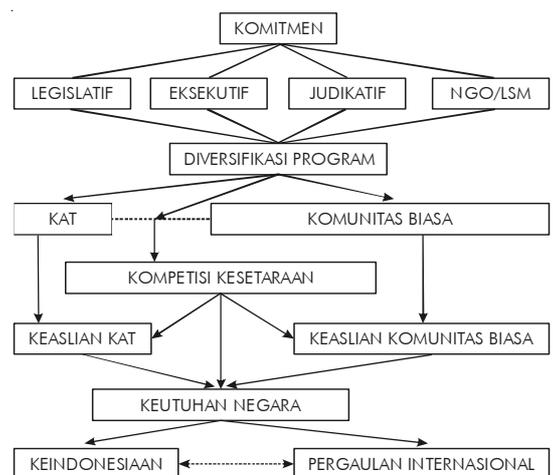
- c). Untuk pengembangan sarana dan prasarana, gedung, jalan, listrik disesuaikan dengan kelayakan.

Catatan: Dari itu penyusunan anggaran disesuaikan dengan waktu yang diperlukan (Penyusun program harus kerjasama dengan penyusun anggaran)

7. Alur Pikir Koseptual Pemberdayaan KAT Dalam Pembangunan

Dari uraian terdahulu, dapat disistematisir alur pikir konseptualnya, sbb:

- a. Bangunan *filosofisnya*, KAT adalah komponen kehidupan publik NKRI yang dapat dan perlu peningkatan ke arah kesejajaran. KAT adalah cermin buram keutuhan dan cermin buram keutuhan adalah keabadian KAT.
- b. Proposisi *teoritisnya* adalah keseriusan kalangan legislatif, eksekutif dan judikatif, dunia usaha dan LSM dalam memperdulikan kehidupan KAT, percepatan pemberdayaan KAT menuju kesejajaran akan segera berhasil dan demikian sebaliknya, dengan model teoritisnya sebagai berikut:



9. Perspektif dan Penutup

Dengan pendekatan kearifan lokal yakni mulai dari idea, aktivitas sosial serta materi kebudayaan masyarakat setempat dipedomani dalam merancang, memprogram, mengimplementasi pembangunan KAT, akan mempercepat gerak mereka ke garis pacu kesejajaran. Jika idea, aktivitas sosial serta materi kebudayaan yang ingin diwujudkan masih utuh bersumber dari *utopis* "menara gading" birokrasi, akademisi, pengusaha, dan NGO/LSM seperti selama ini walaupun sudah melibatkan masyarakat setempat secara semu, perubahan ke arah kesejajaran dimaksud akan tetap berjalan sangat lambat. "Ke-saja-an" membangun retorika yang logis dan indah

didengar dan dibayangkan tentang KAT ini mari kita buang jauh-jauh karena itu hanya buang-buang waktu, sementara kita sedang berpacu dengan waktu dan hak asasi kesetaraan, peningkatan dan kemajuan bersama sebangsa dan setanah air hingga kehidupan global. Mari pasang niat tulus, buat rancangan penelitian, pembangunan dengan waktu pelaksanaan serta anggaran yang sepatutnya bagi sebuah kegiatan "mengubah budaya" suatu masyarakat yang berat, lama tapi suci. Buat paradigma KAT yang beda dengan paradigma untuk pembangunan masyarakat yang biasa. Baik oleh Bapeda-Bapeda setempat, Bappenas, Ditjen Anggaran, BPK dan DPR. Mudah-mudahan kita akan berhasil karena Tuhan YME pasti menghendakinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2003, *Potensi Dan Peran Keragaman Kearifan Lokal Nusantara Dalam Pengembangan Kebudayaan Indonesia*. Makalah Seminar/Dialog Budaya Pekan Apresiasi Budaya X, NTB Granada/Graha Ayu, 18 – 9 -2003
- Humas Pemda Lombok Barat, 1991, *Gema Patut, Patuh, Patju*. Klipping Koran dan Dokumentasi.
- I. Nengah Kayun BA, dkk. 1986, *Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Masyarakat Terhadap Lingkungan Daerah NTB*. Mataram: Proyek inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Jalaludin Arzaki, dkk. 2001, *Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Budaya Lokal: Suku Bangsa Sasak Dalam Pluralisme Kehidupan Bermasyarakat*. Mataram: Pokja Redam NTB
- Kencana S.Pelawi, (Ed.). 1992, *Tatakrama dan Kesetiakawanan Sosial Dalam Ungkapan Tradisional Daerah NTB*. Jakarta: Terbitan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya. Kehidupan Bermasyarakat
- Koentjaraningrat, 1980, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lalu Lukman (Ed. Erman Rajagukguk). 2005, *Pulau Lombok Dalam Sejarah: Ditinjau dari aspek budaya*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- M. Ridwan Lubis (Ed.). 2005, *Meretas Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Terbitan Balitbang dan Diklat Keagamaan Depag RI
- , 2005, *Cetak Biru Peran Agama: Merajut Kerukunan, Kesetaraan Gender, dan Demokratisasi dalam Masyarakat Multikultural*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Keagamaan Depag RI
- Mus Biawan. 2003, *Kearifan Lokal: Kekuatan Yang Terabaikan*. Makalah Seminar/Dialog Budaya Pekan Apresiasi Budaya X, NTB Granada, 18 – 9 -2003
- M.Yunus melalatoa. 1995, *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia*. Jld A-Z. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

- Puslitbang Kehidupan Beragama Balitbang dan Diklat Keagamaan Depag RI. 2005, *Rumusan Hasil Dialog/Diskusi Pengembangan Wawasan Multikultural Antar Pemuka Agama Pusat dan Daerah: Di Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bengkulu*. Jakarta: Tidak diterbitkan
- Rahmat Hidayat, dkk. 2003, *Atlas Nasional Persebaran Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta: Ditjen Pemberdayaan Sosial, Departemen Sosial RI
- Rusmin Tumanggor, dkk, 2004, *Model Kedamaian Sosial: Di Wilayah Konflik*. Jakarta: Terbitan Kerjasama Lemlit UIN Syarif Hidayatullah dan Balatbangsos Depsos RI
- , 2004, *Konflik dan Modal Kedamaian Sosial dalam Konsepsi Kalangan Masyarakat di Tanah Air*. Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatullah dan Balatbangsos Depsos RI
- Robert Chambers. 1983, *Rural Development: Putting the Last First*. London: Published by Longman, Inc.
- Rosiady Husaenie dan Muhammad Faqih Langitan. 2003, *Perjalanan Orang Sasak Menjadi Gubernur: Kilas balik pemilihan Gubernur NTB*. Mataram: Pantheon Madia Pressindo.
- Seminar & Lokakarya. 2004, *GTZ Urban Quality: Lombok Style - Kabupaten Lombok Tengah*. Kumpulan Makalah.

Catatan kaki:

- * Makalah pada Semiloka Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Bagi Kepala Sub. Dinas Sosial Provinsi dan Unsur Perguruan Tinggi, di Hotel Golden Boutique, Jln. Angkasa 1 Jakarta Pusat, Rabu, 15-11-2006 Jam 11.00 – 12.00 WIB (Tgl 14 s.d 18 November 06)
- ¹ Lihat, Warner G. Bennis , et al. (ed), *The Planning of Change*. New York: Holth, Rinehart and Winston, Inc. 1969, p. 56-57
- ² Lihat, Rusmin Tumanggor, *Respon Masyarakat Terhadap Inovasi Kesehatan Dalam Penanggulangan Penyakit Diare Balita: Suatu Studi Di Desa Karang Tengah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat (Tesis Bidang Multidisipliner Program Pengkhususan Antropologi Kesehatan)*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, h. 27-28.
- ³ Lihat, Rusmin Tumanggor, *Sentuhan Sistem Community Development Industri Berskala Besar Terhadap Perubahan Masyarakat Sekitar (Suatu Analisa Strategi Implementasi Kebijakan)*. Banda Aceh: Pusat Pengembangan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala Aceh, 1987, h. 12-13.

BIODATA PENULIS:

Rusmin Tumanggor, Guru Besar Antropologi Kesehatan pada Universitas Islam Negeri Jakarta. Anggota Tim Pakar pada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan anggota Panitia Pembina Ilmiah pada Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI. Konsultan di bidang penelitian dan pemberdayaan sosial di Departemen Sosial dan instansi pemerintah.